

Nama : Zildjian Fitri

NPM : 2213031086

Mata Kuliah : Peminatan 1 Ekonomi Industri

Dosen : Dr. Pujiati, M.Pd., Drs. Nurdin, M.Si., dan Meyta Pritandari, S.Pd., M.Pd.

RESUME BUKU

“STUDI SCP DI INDONESIA”

BUKU KE 1:

Judul Buku	Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan
Penulis	Dr. Ahmad Albar Tanjung, M.Si. dan Dr. Dede Ruslan, M.Si.
Penerbit	Prenada Media (divisi Kencana)
Tahun Terbit	2016
ISBN	978-623-218-324-7

Buku Ekonomi Industri: Teori dan Kebijakan oleh Dr. Ahmad Albar Tanjung, M.Si. dan Dr. Dede Ruslan, M.Si. merupakan salah satu referensi penting yang mengupas hubungan antara struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja industri dalam kerangka Structure–Conduct–Performance (SCP). Penulis menegaskan bahwa struktur pasar adalah fondasi utama yang menentukan bagaimana suatu industri berkembang. Struktur pasar meliputi jumlah pelaku usaha, tingkat konsentrasi, diferensiasi produk, hambatan masuk dan keluar, serta distribusi kekuatan pasar antarperusahaan. Dalam konteks Indonesia, berbagai industri strategis seperti telekomunikasi, semen, minyak goreng, dan air minum dalam kemasan menunjukkan karakteristik oligopoli, di mana beberapa perusahaan besar menguasai sebagian besar pangsa pasar. Kondisi ini tidak hanya menciptakan dominasi pemain besar, tetapi juga membatasi peluang perusahaan kecil untuk masuk dan berkembang akibat tingginya kebutuhan modal, jaringan distribusi yang dikuasai pemain lama, serta peraturan yang ketat.

Dalam struktur pasar seperti itu, perilaku perusahaan menjadi aspek penting berikutnya yang dijelaskan dalam buku ini. Perusahaan dalam pasar oligopolistik tidak dapat bertindak secara independen karena keputusan satu perusahaan hampir selalu memengaruhi strategi pesaing lainnya. Hal ini terlihat jelas dalam penetapan harga, strategi promosi, inovasi produk, serta kebijakan produksi. Harga yang sama atau pola kenaikan harga yang hampir serempak di

industri tertentu bukan berarti adanya kolusi langsung, tetapi lebih merupakan bentuk penyesuaian alami karena perusahaan-perusahaan besar saling memperhatikan langkah kompetitornya. Perilaku seperti price leadership atau kepemimpinan harga, promosi agresif, diferensiasi merek, hingga integrasi vertikal menjadi strategi yang umum digunakan untuk mempertahankan posisi pasar. Penulis menggarisbawahi bahwa dalam industri dengan konsentrasi tinggi, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam membuat keputusan karena persaingan yang berlangsung tidak hanya melalui harga, tetapi juga melalui kualitas layanan, citra merek, dan inovasi bertahap.

Dari interaksi antara struktur pasar dan perilaku perusahaan inilah muncul kinerja industri yang beragam. Buku ini menjelaskan bahwa industri dengan tingkat konsentrasi tinggi sering kali memiliki efisiensi produksi yang lebih baik karena perusahaan besar dapat memanfaatkan skala ekonomi, teknologi canggih, dan jaringan distribusi yang luas. Namun, efisiensi ini tidak selalu berbanding lurus dengan manfaat bagi konsumen. Dalam banyak kasus, harga produk di pasar oligopoli cenderung stabil tetapi berada pada tingkat yang kurang kompetitif karena minimnya tekanan dari pesaing baru. Selain itu, pilihan produk relatif terbatas dan inovasi berjalan lebih lambat karena perusahaan besar tidak merasa terancam oleh pesaing kecil. Dampaknya, konsumen terkadang tidak memperoleh nilai yang sepadan dengan apa yang sebenarnya bisa dicapai dari sebuah pasar yang lebih kompetitif. Perusahaan kecil, di sisi lain, menghadapi kesulitan bertahan karena keterbatasan modal, teknologi, dan akses distribusi sehingga pangsa pasar cenderung tetap dikuasai perusahaan besar dari waktu ke waktu.

Buku ini juga menyoroti peran regulator dan pemerintah dalam menjaga iklim persaingan yang sehat agar struktur pasar yang cenderung oligopolistik tidak mengarah kepada praktik anti-persaingan. Lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi garda depan dalam mengawasi potensi praktik kartel harga, pengaturan produksi, serta hambatan masuk yang bersifat eksklusif atau diskriminatif. Kasus-kasus kartel pangan, misalnya, menunjukkan pentingnya pengawasan tegas untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menyalahgunakan posisi dominannya. Selain itu, kebijakan deregulasi di sektor telekomunikasi menunjukkan bagaimana campur tangan pemerintah dapat menciptakan peluang masuk bagi pemain baru, menurunkan harga, dan meningkatkan kualitas layanan. Penulis menekankan bahwa regulasi yang tepat harus mampu menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan konsumen, sehingga efisiensi industri dapat berjalan seiring dengan keadilan pasar.

Buku ini menegaskan bahwa pendekatan Structure–Conduct–Performance sangat relevan dalam memahami dinamika industri di Indonesia. Melalui kombinasi teori ekonomi industri dan contoh nyata dari berbagai sektor, pembaca diajak untuk melihat hubungan erat antara struktur pasar, perilaku pemain usaha, dan hasil industri. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat luas untuk menyadari bahwa persaingan yang sehat merupakan pilar penting bagi ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Dengan memahami SCP, pembaca dapat melihat bahwa keberhasilan industri tidak hanya ditentukan oleh kekuatan perusahaan besar, tetapi juga oleh kualitas regulasi serta keterbukaan pasar yang memungkinkan persaingan berjalan dengan adil dan transparan.

BUKU KE 2:

Judul Buku	Ekonomi Industri
Penulis	Muhammad Teguh
Penerbit	Rajawali Pers – PT Raja Grafindo Persada, Depok
Tahun Terbit	2020 (Edisi 1, Cetakan ke-5)
ISBN	978-979-769-308-4

Studi mengenai *Structure–Conduct–Performance* (SCP) di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika industri nasional tidak lahir secara alami seperti dalam teori pasar persaingan sempurna, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan dominasi pelaku besar. Buku *Ekonomi Industri* oleh Muhammad Teguh menekankan bahwa struktur pasar di Indonesia banyak dibentuk oleh intervensi kebijakan, bukan oleh mekanisme kompetisi bebas. Berbagai kebijakan seperti perlindungan impor, penunjukan langsung kepada perusahaan tertentu, pemberian konsesi eksklusif, serta izin usaha yang selektif menciptakan struktur pasar yang cenderung monopolistik atau oligopolistik. Kebijakan semacam ini telah menghambat terciptanya pasar yang terbuka dan kompetitif, sehingga beberapa pemain besar mampu menguasai pangsa pasar secara signifikan tanpa adanya tekanan persaingan yang memadai.

Penelitian Thee Kian Wie, Shauki, dan Hasibuan menguatkan pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sering kali menghasilkan *high cost economy*. Struktur pasar yang tidak kompetitif juga menimbulkan biaya transaksi tinggi, ketidakpastian

regulasi, dan ketergantungan pada perusahaan dominan. Kombinasi ini menciptakan lingkungan usaha yang kurang kondusif bagi inovasi maupun efisiensi, terutama pada industri strategis seperti energi, infrastruktur, dan sektor manufaktur dasar. Dalam beberapa kasus, struktur pasar oligopolistik justru dipertahankan oleh kebijakan proteksionis demi menjaga stabilitas industri, sekaligus menjadi tantangan besar bagi terciptanya iklim usaha yang sehat.

Struktur pasar yang demikian kemudian berpengaruh langsung terhadap perilaku perusahaan. Dalam pasar dengan tingkat konsentrasi tinggi, perusahaan yang memiliki kekuatan pasar akan cenderung menetapkan harga di atas tingkat kompetitif, membatasi output, dan mengatur kapasitas produksi. Pada sektor oligopoli, strategi seperti *price leadership* (kepemimpinan harga), *limit pricing* (penetapan harga batas untuk menghalangi masuk), dan bahkan kolusi terselubung menjadi perilaku yang umum dijumpai. Perusahaan-perusahaan besar juga sering memusatkan perhatian pada upaya mempertahankan dominasi melalui integrasi vertikal, penguasaan distribusi, dan penguatan merek, daripada mengejar inovasi teknologi atau efisiensi biaya. Hal ini terjadi karena struktur pasar yang tertutup tidak mendorong perusahaan untuk bersaing secara agresif—bahkan kompetisi sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keuntungan.

Dalam pasar yang tidak kompetitif, insentif untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan juga berkurang. Ketika peluang masuk pesaing baru rendah, perusahaan incumbents (yang sudah mapan) dapat mempertahankan kekuatan pasar tanpa harus melakukan inovasi signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa fokus perusahaan lebih condong pada manuver strategis yang melindungi posisi pasar, seperti perjanjian informal antarperusahaan, pembatasan distribusi, atau penguasaan bahan baku. Hal ini memperkuat argumen bahwa perilaku anti-persaingan sering kali merupakan konsekuensi langsung dari struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi.

Kinerja pasar Indonesia akhirnya mencerminkan konsekuensi dari struktur dan perilaku tersebut. Harga barang dan jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan kondisi pasar yang kompetitif, sementara efisiensi produksi relatif rendah. Industri sering mengalami ketertinggalan teknologi karena kurangnya tekanan untuk berinovasi. Dalam konteks SCP, hubungan ini menunjukkan bahwa struktur pasar yang monopolistik atau oligopolistik akan menghasilkan perilaku perusahaan yang tidak efisien, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pada pasar monopoli, terdapat perpindahan kesejahteraan dari

konsumen ke produsen karena produsen dapat menetapkan harga jauh di atas biaya marginal tanpa ancaman kehilangan pangsa pasar.

Kinerja yang tidak optimal ini terlihat jelas pada beberapa industri dasar di Indonesia, seperti semen, telekomunikasi, dan minyak goreng. Meski terdapat beberapa pemain besar yang efisien dalam skala produksi, harga produk tetap tidak mencerminkan efisiensi biaya karena tingkat persaingan yang rendah. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat merugikan perekonomian karena menghambat pertumbuhan industri kecil dan menurunkan daya saing nasional.

Selain struktur dan perilaku perusahaan, intervensi pemerintah melalui kebijakan merger dan konsolidasi juga memengaruhi hubungan SCP di Indonesia. Sejumlah merger, seperti merger perbankan pasca-krisis atau konsolidasi industri pupuk, dilakukan dengan tujuan memperkuat permodalan perusahaan, meningkatkan skala ekonomi, atau mempersiapkan daya saing terhadap pasar global. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak semua merger menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan. Dalam beberapa kasus, merger justru memperbesar tingkat konsentrasi pasar tanpa diikuti oleh peningkatan efisiensi atau inovasi. Hal ini dapat memperburuk kondisi persaingan karena semakin mempersempit jumlah pelaku usaha.

Melalui analisis SCP, dapat disimpulkan bahwa dominasi pelaku besar dan intervensi pemerintah yang kurang tepat telah membentuk struktur pasar yang tidak kompetitif. Kondisi ini mendorong perilaku anti-persaingan dan menghasilkan kinerja pasar yang tidak optimal bagi konsumen. Harga tinggi, pilihan terbatas, dan inovasi yang lambat menjadi konsekuensi utama dari struktur pasar yang tidak terbuka. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih tegas dalam mendorong persaingan sehat. Hal ini mencakup pengurangan hambatan masuk, penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan peran lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Selain itu, kebijakan industri harus diarahkan untuk menciptakan pasar yang lebih inklusif, mengurangi kekuatan dominan perusahaan besar, serta memberikan ruang bagi inovasi dan pertumbuhan perusahaan kecil-menengah. Dengan struktur pasar yang lebih kompetitif, perilaku perusahaan dapat lebih efisien dan kinerja pasar akan lebih menguntungkan masyarakat luas.

DOKUMENTASI

